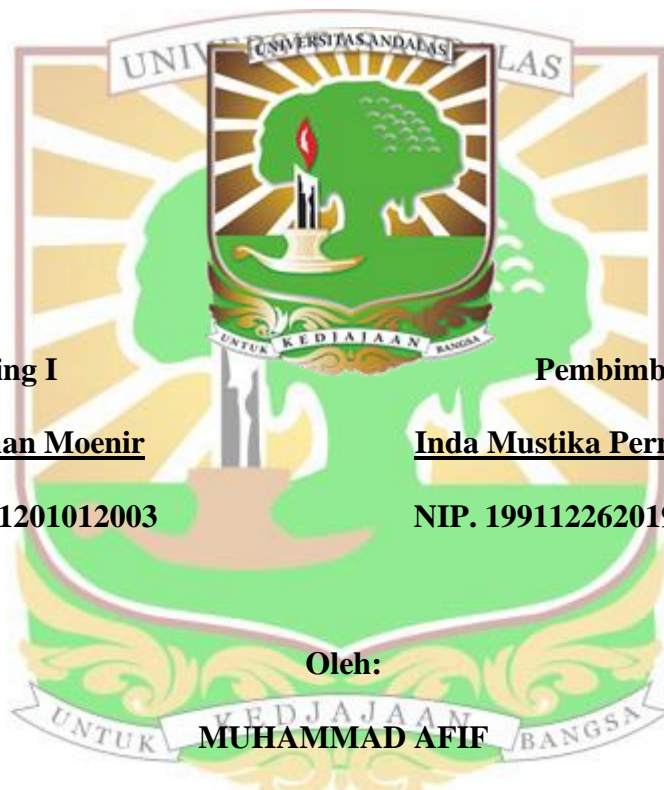


GAYA KEPEMIMPINAN NARENDRA MODI DALAM KEBIJAKAN

PENCABUTAN OTONOMI KASHMIR TAHUN 2019

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*



Pembimbing I

Haiyyu Darman Moenir

NIP. 19801221201012003

Pembimbing II

Inda Mustika Permata, S.IP, MA

NIP. 199112262019032015

Oleh:

MUHAMMAD AFIF

1710852001

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

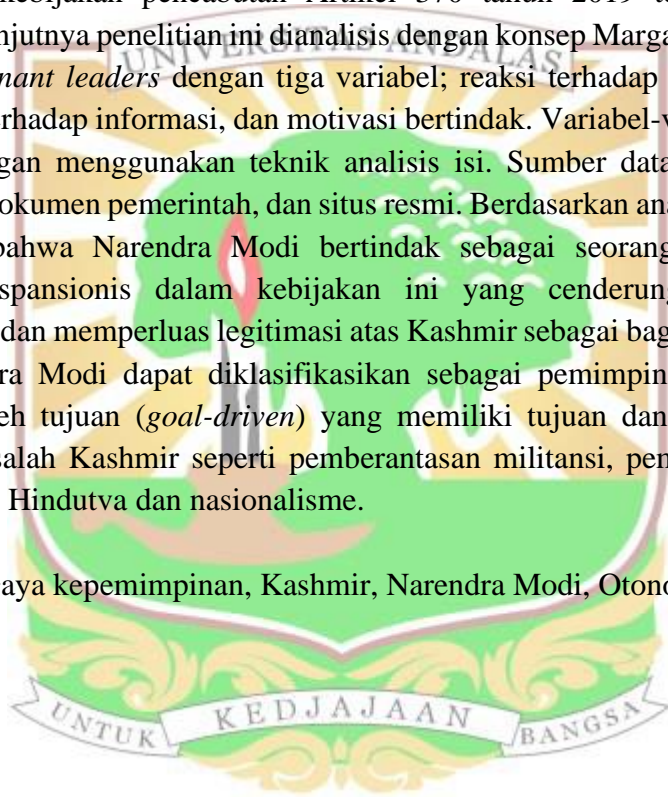
UNIVERSITAS ANDALAS

2021

ABSTRAK

Ketika Narendra Modi memenangkan pemilihan Lok Sabha pada tahun 2014, ia mulai mencari cara untuk mencabut Artikel 370. Narendra Modi selalu menolak penyelesaian dialog tentang Kashmir dengan Pakistan. Sikap ini menunjukkan arah berlawanan dari dua perdana menteri India sebelumnya yang cenderung mencari cara untuk menyelesaikan masalah Kashmir. Pada 5 Agustus 2019, otonomi khusus Kashmir secara resmi dicabut yang menunjukkan pengaruh kuat dari Narendra Modi. Kebijakan ini tidak hanya mencoreng wajah India sebagai negara sekuler multietnis, tetapi juga menciptakan ketegangan di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan Narendra Modi dalam kebijakan pencabutan Artikel 370 tahun 2019 tentang otonomi Kashmir. Selanjutnya penelitian ini dianalisis dengan konsep Margaret G. Hermann yaitu *predominant leaders* dengan tiga variabel; reaksi terhadap kendala politik, keterbukaan terhadap informasi, dan motivasi bertindak. Variabel-variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, dokumen pemerintah, dan situs resmi. Berdasarkan analisis, penelitian menemukan bahwa Narendra Modi bertindak sebagai seorang *crusader* dan pemimpin ekspansionis dalam kebijakan ini yang cenderung memaksakan kekuasaannya dan memperluas legitimasi atas Kashmir sebagai bagian integral dari India. Narendra Modi dapat diklasifikasikan sebagai pemimpin dominan yang digerakkan oleh tujuan (*goal-driven*) yang memiliki tujuan dan prinsip sendiri mengenai masalah Kashmir seperti pemberantasan militansi, pembangunan, dan aspek ideologi Hindutva dan nasionalisme.

Kata Kunci: Gaya kepemimpinan, Kashmir, Narendra Modi, Otonomi.



ABSTRACT

When Narendra Modi won the Lok Sabha election in 2014, he started to explore ways in revoking Article 370. Narendra Modi always refused dialog resolution about Kashmir with Pakistan. This stance shows the opposite direction of the two previous Indian prime ministers that tended to find a way to solve the Kashmir problem. In August 5th 2019, the special autonomy of Kashmir was officially revoked which shows a strong influence from Narendra Modi. This policy not only tarnishes India's face as a secular, multi-ethnic state, but also creates tensions in the region. This study aims to describe the leadership style of Narendra Modi in the revocation of Article 370 policy in 2019 about Kashmir autonomy. Furthermore, this study is analyzed with Margaret G. Hermann concept of predominant leaders with three variables; reaction to political constraints, openness to information, and motivation for actions. These variables were analyzed using content analysis technique. Sources of data are obtained from books, journals, government documents, and official websites. Based on analysis, the study found that Narendra Modi act as crusader and expansionist leader in this policy who tend to force his power and expand legitimacy over Kashmir as an integral part of India. Narendra Modi can be classified as a goal-driven predominant leader who has its own objectives and principles regarding the Kashmir issue such as eradicating militancy, development, and aspects of Hindutva ideology and nationalism.

Keywords: Autonomy, Kashmir, Leadership Style, Narendra Modi.

